

---

## DEMOKRATISASI DAN PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK ETNIS DAN AGAMA DI SUDAN TAHUN 2019-2024

Oleh

Gracia Betaria Yoelanda Samosir

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana  
Salatiga

E-mail: [372021064@student.uksw.edu](mailto:372021064@student.uksw.edu)

---

### Article History:

Received: 24-04-2025

Revised: 07-05-2025

Accepted: 27-05-2025

### Keywords:

Transisi Politik, Rezim  
Otoriter, Demokratisasi,  
Masyarakat Sipil.

**Abstract:** Sudan sebagai negara dengan keragaman etnis dan agama yang beragam, telah terjebak dalam konflik internal dan pemerintahan otoriter selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaan tahun 1956, Sudan menghadapi serangkaian krisis politik, perang saudara, dan ketegangan etnis dan agama yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rezim otoriter Omar al-Bashir yang berkuasa selama tiga dekade menandai era represif yang diwarnai pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta krisis ekonomi yang parah. Kejatuhan al-Bashir pada 2019 menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil di Sudan dalam memperjuangkan sistem politik yang lebih demokratis. Namun demikian, proses demokrasi masih menghadapi tantangan besar hingga saat ini, terutama karena dominasi militer yang terus membatasi ruang politik sipil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses demokratisasi di Sudan dengan menggunakan perspektif teori demokrasi dan konsep civil society. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat sipil dapat mendorong perubahan politik dan menyeimbangkan kekuasaan negara. Dengan menganalisis dinamika politik Sudan secara historis dan teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang tantangan dan prospek demokrasi di negara-negara pasca-otoriter

---

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara terbesar di Afrika, Sudan memiliki wilayah yang luasnya mencapai 2.5 juta km<sup>2</sup>, yang mencakup lebih dari 8% dari total luas benua Afrika. Sudan memiliki daya tarik tersendiri karena keberagaman etnis, agama, dan budaya yang dimilikinya. Negara ini menganggap dirinya sebagai representasi dari keragaman Afrika, terutama di wilayah Selatan. Dengan populasi sekitar 30 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah, Sudan dihuni oleh sekitar 56 kelompok etnis, yang kemudian terbagi lagi menjadi

597 sub kelompok dengan 115 bahasa dan dialek. Selain etnis, Sudan juga memiliki beragam kepercayaan beragama dengan sekitar 60% penduduk beragama Islam, 15% Kristen, dan 25% menganut animisme atau agama tradisional. Batas wilayah Sudan bisa dikatakan cukup kompleks karena perpindahan kelompok etnis yang kerap melintasi perbatasan (Mwaniki, 2019).

Sudan merupakan negara yang memiliki sejarah panjang yang diwarnai oleh konflik internal dan dinamika politik yang kompleks. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan menghadapi berbagai ketidakstabilan politik yang akibat serangkaian konflik, kudeta militer, dan rezim pemerintahan otoriter. Salah satu konflik yang paling berpengaruh adalah perang saudara pertama yang terjadi dari tahun 1955 hingga 1972. Konflik ini berakar pada ketegangan agama antara wilayah utara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan wilayah selatan yang didominasi oleh pemeluk Kristen serta agama tradisional. Ketidakpuasan wilayah selatan terhadap dominasi politik dari pemerintahan utara menjadi pemicu dari pertikaian ini. Meskipun perjanjian perdamaian berhasil dicapai pada tahun 1972, konflik kembali muncul pada akhir 1980-an seiring meningkatnya ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok Sudan Selatan (Back, 2020).

Sudan telah lama berada di bawah pemerintahan otoriter yang membatasi kebebasan politik dan sipil. Pada tahun 1989, Omar al-Bashir berhasil merebut kekuasaan dan naik menjadi presiden melalui kudeta militer dan menjalankan pemerintahan otoriter. Selama masa kepemimpinannya, ia dikenal menerapkan kebijakan represif yang mengekang kebebasan sipil, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, serta menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan dominasi politiknya (Alweqyan, 2024). Di bawah pemerintahannya, Sudan mengalami berbagai konflik internal yang berkepanjangan, termasuk perang saudara yang diakibatkan oleh ketegangan etnis dan agama. Salah satu konflik yang tragis terjadi di Darfur, yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan jutaan penduduk terpaksa mengungsi dan meninggalkan tempat tinggal mereka (Çınar & Özer, 2023).

Kebijakan otoriter yang diterapkan di Sudan juga meningkatkan ketimpangan ekonomi di negara tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintahan al-Bashir, lebih banyak berorientasi pada kepentingan politik dan militer, termasuk pengalihan sumber daya alam, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian menyebabkan kesenjangan sosial serta kemiskinan yang meluas di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, krisis ekonomi tersebut diperburuk oleh sanksi internasional yang dikenakan sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim al-Bashir, yang menyebabkan Sudan semakin terisolasi dari perdagangan global dan keuangan internasional. Dampak dari sanksi sangat terasa dalam berbagai sektor yang menjadi sumber pendapatan negara, yang kemudian mengakibatkan kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat (Kostelyanets, 2022).

Kondisi perekonomian Sudan terus mengalami kemerosotan yang semakin parah setelah terjadinya pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Peristiwa ini menyebabkan negara kehilangan sebagian besar cadangan minyak, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan negara. Hal tersebut menyebabkan Sudan mengalami guncangan ekonomi yang sangat besar, ditandai dengan inflasi yang melambung tinggi, peningkatan angka pengangguran, serta kekurangan bahan pokok yang berdampak langsung pada kehidupan

sehari-hari masyarakat. Kondisi yang semakin buruk memberikan tekanan yang besar terhadap pemerintahan Bashir, yang pada akhirnya memicu gelombang protes luas. Pada akhir tahun 2018, gelombang protes dan gerakan perlawanan besar-besaran mulai terjadi di berbagai kota di Sudan. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat Sudan, yang telah lama menghadapi represi politik dan kesulitan ekonomi, turun ke jalan untuk melancarkan demonstrasi untuk menuntut perubahan (Wahiduddin, 2020).

Demonstrasi yang terus berlanjut, pada akhirnya mengakibatkan Omar al-Bashir berhasil digulingkan pada April 2019, yang mengakhiri tiga dekade pemerintahan otoriternya. Runtuhnya rezim otoriter Omar al-Bashir menjadi titik balik dari sejarah politik di Sudan yang kemudian memberikan harapan akan adanya perubahan dalam sistem politik yang ada di Sudan. Harapan akan terbentuknya pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan demokratis di tengah masyarakat, telah lama didambakan. Namun, meskipun sebagian besar masyarakat di Sudan mendambakan demokrasi, negara ini masih terus dihadapkan pada tantangan besar untuk menciptakan sistem demokrasi yang stabil masih sangat besar, khususnya karena adanya intervensi militer yang berulang kali membatasi ruang kebebasan politik menandakan bahwa proses demokratisasi Sudan masih berada dalam kondisi rapuh (Firmian & Mirghani, 2022).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah di masa yang akan datang Sudan dapat kembali bertransformasi menjadi negara demokrasi yang stabil? Atau apakah demokratisasi tersebut akan terus terhalang oleh warisan struktur otoritarian yang masih mengakar hingga saat ini? Lalu bagaimana peran masyarakat dapat ditingkatkan untuk mendukung demokratisasi yang berkelanjutan, apakah kemudian masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan transformasi politik? Di satu sisi, ada optimisme bahwa demokratisasi dapat menghasilkan negara yang lebih terbuka dan demokratis bagi warga negaranya. Namun di sisi lain, terdapat kecemasan bahwa negara Sudan akan selamanya berada dalam cengkeraman kekuasaan otoriter militer yang mendominasi proses politik. Oleh sebab itu, pemahaman tentang demokratisasi, peran masyarakat sipil, dan dinamika politik di Sudan menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna menilai bagaimana arah serta keberlanjutan perubahan politik di negara tersebut.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini akan bertumpu pada teori demokrasi dan *konsep civil society* sebagai kerangka analisis untuk membantu memahami dinamika demokratisasi di Sudan, dimana keduanya memainkan peran krusial dalam menentukan arah perubahan politik suatu negara. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana setiap keputusan politik dan kebijakan negara harus mencerminkan aspirasi dan berlandaskan pada kepentingan masyarakat. David Held berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Held menguraikan berbagai bentuk demokrasi yang telah berkembang sepanjang sejarah, mulai dari demokrasi klasik di Athena yang bersifat langsung, hingga demokrasi liberal modern yang menekankan perlindungan hak individu dan pemisahan kekuasaan. Ia menekankan bahwa demokrasi bukan sekedar mekanisme elektoral untuk memilih pemimpin, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta

mengawasi jalannya pemerintahan (Held, 2006).

Demokrasi yang ideal harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, demokratisasi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi yang lebih substansial. Demokratisasi merujuk pada proses peralihan sistem politik dari otoritarianisme menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif, di mana hak-hak politik, kebebasan sipil, dan partisipasi politik masyarakat dapat terlaksana secara bebas dan tanpa hambatan. Proses tersebut seringkali melibatkan perubahan signifikan dalam struktur politik, lembaga-lembaga negara, serta norma dan nilai sosial yang mendasari kehidupan politik suatu negara. Menurut Samuel P. Huntington (1993), demokratisasi terjadi dalam gelombang, dengan negara-negara yang sebelumnya dikuasai rezim otoriter berusaha untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih representatif (Riedl et al., 2020).

Konsep *civil society* atau masyarakat sipil telah menjadi konsep penting dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya dalam konteks pembangunan demokrasi. *Civil society* sebagaimana dikemukakan oleh Gellner (1994), menjelaskan bahwa masyarakat sipil adalah ruang yang berada di antara negara dan individu, di mana individu bebas untuk berinteraksi dan mengorganisasi diri tanpa campur tangan langsung dari negara. Ini merupakan tempat dimana hak-hak dan kebebasan individu dilindungi oleh hukum dan norma sosial. Gellner menganggap bahwa masyarakat sipil berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan berperan penting untuk memastikan hak-hak individu tidak dilanggar.

Masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu elemen utama dalam transisi menuju demokrasi, karena kelompok-kelompok tersebut membantu mendidik warga negara tentang hak-hak mereka, serta memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Masyarakat sipil berpotensi menjadi aktor krusial dalam transformasi struktur politik, yang tidak hanya berpartisipasi dalam perubahan rezim, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan penyeimbang relasi kekuasaan antara warga dan negara. Dengan menganalisis dinamika demokratisasi melalui pendekatan ganda, yakni masyarakat sebagai aktor non-negara dan proses kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka pemahaman yang holistik. Pendekatan ini esensial untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap transformasi politik, termasuk identifikasi faktor pendorong maupun penghambat dalam mencapai konsolidasi demokrasi di Sudan (McDonough & Rodríguez, 2020)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif untuk mengkaji fenomena sosial-politik yang kompleks di Sudan. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif secara khusus sesuai untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang bersifat kompleks karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman mendalam melalui deskripsi kontekstual, mengeksplorasi makna di balik fenomena sosial, dan mempertahankan fleksibilitas metodologis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami realitas sosial secara holistik tetapi juga melakukan adaptasi desain penelitian secara dinamis ketika menemukan perkembangan baru di lapangan, khususnya ketika melakukan penelitian, dimana dalam proses pengumpulan data,

arah dan fokus penelitian dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang ditemukan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akar Historis-Politik Konflik Etnis dan Agama di Sudan

Sudan telah menjadi salah satu negara di Afrika dengan catatan konflik bersenjata terlama, yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Menariknya, konflik ini sudah ada bahkan sebelum Sudan merdeka pada tahun 1956. Jika menelusuri sejarahnya, sejak pertengahan abad ke-20, konflik dengan kekerasan berskala besar telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap sosial-politik di negara ini. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi dua perang saudara besar di Sudan, yang menjadi titik penting dalam sejarah konflik di Sudan. Perang saudara pertama berlangsung antara tahun 1956 hingga 1972, dan perang saudara kedua berlangsung antara tahun 1983 hingga tahun 2005. Kedua perang ini menjadi tonggak utama dalam sejarah konflik internal di Sudan (SAPA, 2024).

Salah satu peristiwa kunci yang menjadi titik awal konflik yang berkepanjangan ini adalah Pemberontakan Torit pada tahun 1955. Pemberontakan ini dilakukan oleh tentara militer dari wilayah Sudan bagian selatan, sebagai perlawanan terhadap pemerintah pusat di Khartoum. Hal ini terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang timpang, dimana kekuasaan hanya terpusat pada kaum elit Arab-Muslim di wilayah Utara dan mengabaikan wilayah Selatan yang mayoritas penduduknya menganut kepercayaan tradisional dan Kristen. Ketegangan ini terus berlanjut setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, hingga akhirnya berkembang menjadi Perang Saudara pertama yang berlangsung hingga 1972. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan islamisasi, yang menjadikan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa resmi, juga menerapkan hukum islam di wilayah selatan. Perang Saudara pertama kemudian diakhiri dengan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972, yang memberi otoritas terbatas pada wilayah Selatan (Johnson, 2016).

Perang Saudara Kedua di Sudan kembali terjadi pada tahun 1983 ketika pemerintah pusat gagal memenuhi janji otonomi wilayah yang telah diberikan pada Sudan Selatan. Situasi juga diperparah dengan kebijakan Presiden Jaafar Nimeiri yang mencabut status otonomi selatan secara sepihak, serta penerapan *September Laws* yang memberlakukan syariat Islam sebagai hukum nasional. Kebijakan tersebut menjadi pemicu utama yang memperburuk kemarahan masyarakat di wilayah selatan, yang selama ini telah merasakan perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat. Selain isu identitas etnis dan agama, faktor ekonomi juga turut memperkeruh keadaan, khususnya terkait perebutan kendali penguasaan sumber daya minyak yang sebagian besar berada di wilayah perbatasan antara utara dan selatan. Perang ini berlangsung selama 22 tahun, yang memakan lebih dari 2 juta korban jiwa dan menyebabkan 4 juta orang terpaksa mengungsi (Rone, 2003).

Lengsernya Presiden Jaafar Nimeiri pada 1985 tidak membawa perubahan signifikan bagi Sudan. Pemerintahan berikutnya dipimpin oleh Omar al-Bashir, yang mengambil ahli kekuasaan pada kudeta militer tahun 1989, yang semakin mempertegas bentuk struktur kekuasaan pemerintahan yang otoriter. Selama menjalankan masa pemerintahannya, al-Bashir membangun sistem pemerintahan yang sangat terpusat, dimana kekuasaan politik ekonomi berada di tangan para elite partai dan militer. Bashir juga memperketat kebijakan Arabisasi dan Islamisasi, sebagaimana yang telah diberlakukan oleh Nimeiri, dan

memperkuat kontrol negara dengan menerapkan militerisasi dalam struktur politik sehingga membatasi partisipasi publik dengan mempersempit ruang-ruang demokratis (de Waal, 2015).

Sistem pemerintahan al-Bashir melakukan konsolidasi kekuasaan yang tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga memperparah ketimpangan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan Arabisasi dan Islamisasi yang diperkuat oleh rezim al-Bashir memperdalam marginalisasi terhadap kelompok non-Arab dan non-Islam. Banyak kelompok etnis dan agama berbeda serta masyarakat lokal, terutama di wilayah Sudan selatan, Darfur, Blue Nile, dan Kordofan, yang merasa semakin tersisih dari proses politik maupun distribusi sumber daya (Flint & Waal, 2008). Hal ini menyebabkan ketegangan konflik, alih-alih menyelesaikannya, al-bashir justru memilih menggunakan kekuatan represif dan kekerasan untuk mempertahankan dominasinya. Ia memberikan dukungan kepada milisi bersenjata yang pro-pemerintah, seperti kelompok *Janjaweed* yang kemudian bertransformasi menjadi pasukan paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF), yang digunakan untuk operasi kontra-pemberontakan di wilayah Darfur sejak tahun 2003 (Human Rights Watch, 2005).

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh rezim Omar al-Bashir selama masa pemerintahannya telah menjadi faktor utama yang menyebabkan krisis pengungsian internal terbesar di kawasan Afrika. Berdasarkan data yang dirilis UNHCR pada tahun 2020, terdapat sekitar 2,7 juta orang Sudan yang mengungsi di dalam negeri, yang mewakili sekitar 6% dari total populasi nasional saat itu. Persebaran pengungsi juga sangat tidak merata secara geografis. Wilayah Darfur memiliki angka pengungsi tertinggi, yaitu sekitar 1,8 juta orang (67% dari total pengungsi), Kordofan Selatan dengan 450.000 pengungsi, Blue Nile dengan

250.000 pengungsi, dan 200.000 pengungsi lainnya yang berpindah ke wilayah metropolitan Khartoum, sebagai bentuk perpindahan akibat tekanan sosial-ekonomi di daerah konflik (UNHCR, 2020). Mayoritas pengungsi didominasi oleh kelompok rentan, yaitu anak-anak dan perempuan yang mencakup sekitar 78% dari total pengungsi. Sekitar 40% anak-anak dibawah 12 tahun mengalami malnutrisi, dan 72% tidak dapat mengakses pendidikan selama lebih dari tiga tahun (UNICEF, 2021).

Pemerintahan al-Bashir tidak hanya menjadi penyebab utama krisis kemanusiaan yang terjadi selama puluhan tahun, tetapi juga turut memicu perpecahan negara yang pada akhirnya menyebabkan pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah diskriminasi politik, ekonomi, dan sumber daya yang dialami oleh Sudan Selatan, Islamisasi dan Arabisasi paksa yang diberlakukan, hingga perang saudara berlarut-larut yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Pemisahan Sudan Selatan memberikan dampak yang cukup parah bagi pemerintah pusat, dimana Sudan kehilangan 75% cadangan minyak nasional, yang sebelumnya menjadi setengah dari sumber utama pendapatan negara. Hal ini mengakibatkan terjadinya lonjakan inflasi hingga 65% pada tahun 2012-2013, kenaikan harga pangan dan bahan bakar, serta menyebabkan nilai mata uang Sudan turun drastis (IMF, 2014).

Referendum tahun 2011 yang berujung pada kemerdekaan Sudan, telah menunjukkan betapa gagalnya pemerintahan al-bashir dalam membangun persatuan nasional yang adil dan merata. Sekitar 98% warga Sudan Selatan yang memilih berpisah dari Sudan, adalah

bukti bahwa masyarakat Sudan Selatan merasa diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan tempat sedikitpun dalam sistem pemerintahan pusat. Pemerintah dinilai gagal menjalankan isi dari *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang dibuat tahun 2005, terutama pada bagian pemberian otonomi, pembagian hasil minyak, serta keterlibatan dalam proses politik nasional. Ironisnya, setelah pemisahan Sudan Selatan, al-Bashir justru semakin memperkuat otoritarianisme, dengan menekan oposisi politik serta menutup ruang kebebasan sipil, terutama di wilayah seperti Kordofan dan Blue Nile. Hal ini kemudian membuat rakyat kecewa dan marah, hingga pada akhirnya terjadi aksi demonstrasi skala besar yang berujung pada penggulingan Omar al-Bashir pada tahun 2019 (Johnson, 2016).

### **Runtuhnya Rezim Al-Bashir dan Transisi Demokratik Pasca-Otoritarianisme 2019**

Runtuhnya rezim Omar al-Bashir pada April 2019 menandai titik balik penting dalam sejarah politik Sudan, sebagai tahun transformatif skala besar dalam masyarakat, yang dikenal sebagai Revolusi Sudan, yang juga merupakan momen penting dalam sejarah gerakan sosial. Setelah berkuasa selama hampir 30 tahun melalui pemerintahan otoriter yang ditandai oleh represi politik, pembatasan kebebasan sipil, dan perang berkepanjangan di wilayah seperti Darfur, Bashir akhirnya dilengserkan oleh militer setelah berbulan-bulan demonstrasi besar-besaran yang dipelopori oleh masyarakat sipil. Pemicu utama gelombang protes adalah kenaikan harga bahan makanan dan bahan bakar, tetapi demonstrasi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan revolusioner yang menolak keseluruhan sistem pemerintahan otoriter. Peristiwa ini menjadi pemberontakan kontemporer paling berhasil di Afrika, dimana kekuatan kolektif rakyat dapat disatukan secara efektif untuk mendorong perubahan besar dan melahirkan sebuah revolusi (DeFronzo, 2021).

Setelah Bashir ditumbangkan, Dewan Militer Transisi (TMC) mengambil alih kekuasaan. Namun, masyarakat sipil yang telah berjasa dalam menggulingkan rezim menolak dikucilkan dari proses transisi. Tuntutan mereka terhadap pemerintahan sipil penuh memuncak dalam aksi protes yang lebih besar, termasuk demonstrasi duduk di markas besar militer di Khartoum. Ketegangan antara militer dan sipil memuncak dalam tragedi berdarah pada 3 Juni 2019, ketika pasukan keamanan, termasuk kelompok paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF), menyerang para demonstran dan menewaskan lebih dari seratus orang (Muhammad & Otubanjo, 2023). Peristiwa tersebut memperjelas bahwa militer belum siap menyerahkan kekuasaan sepenuhnya, serta transisi tidak akan berjalan tanpa tekanan serius dari dalam dan luar negeri.

Melalui proses mediasi intensif yang difasilitasi oleh Uni Afrika dan Ethiopia, Sudan berhasil mencapai kesepakatan politik pada Agustus 2019. Kesepakatan ini menjadi tonggak awal proses transisi menuju pemerintahan sipil yang demokratis. Salah satu kesepakatan tersebut adalah menetapkan pembentukan Dewan Kedaulatan (*Sovereign Council*), suatu badan gabungan sipil-militer yang ditugaskan memimpin masa transisi selama 39 bulan menuju pemilihan umum demokratis. Dewan tersebut terdiri dari lima perwakilan sipil, lima militer, dan satu anggota yang disepakati bersama. Selain itu, Abdalla Hamdok, seorang ekonom dan mantan pejabat PBB, ditunjuk sebagai perdana menteri transisi. Struktur tersebut mencerminkan kompromi antara dua kekuatan utama, yaitu rakyat yang mendambakan demokrasi, dan militer yang enggan melepas kekuasaan sepenuhnya (Kuehn & Croissant, 2023).

Meskipun terdapat rasa optimisme di awal transisi, kenyataannya struktur kekuasaan

tetap timpang. Militer masih memegang kendali atas sektor-sektor penting seperti keamanan dan ekonomi, yang mempertahankan pengaruh politik meskipun terjadi perubahan rezim. Namun, pada saat yang sama, terbentuknya institusi sipil dalam pemerintahan transisi memberikan secercah harapan baru demokrasi di Sudan. Terbukanya ruang politik memungkinkan kebebasan pers yang lebih besar, pengakuan terhadap kelompok oposisi, serta diskusi publik yang lebih terbuka, sesuatu yang sangat jarang terjadi di bawah pemerintahan Bashir. Namun, sebagaimana akan terlihat pada fase-fase berikutnya, kemunculan pemerintahan sipil dan militer tersebut merupakan pondasi yang rapuh, dan menjadi titik awal bagi tantangan-tantangan serius dalam upaya demokratisasi Sudan (ACLED, 2020).

Rezim Omar al-Bashir bisa dianggap sebagai contoh nyata dari konsep *authoritarian upgrading* yang dijelaskan oleh Steven Heydemann (2007), yaitu strategi rezim otoriter yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara adaptif tanpa benar-benar melakukan perubahan menuju demokrasi. Dalam kasus Sudan, al-Bashir memanfaatkan narasi agama sebagai alat legitimasi kekerasan negara, dengan menerapkan syariat Islam dan retorika Arabisasi untuk membenarkan penindasan terhadap kelompok oposisi dan masyarakat yang memiliki identitas berbeda. Selain itu, sumber daya alam seperti minyak dan emas, digunakan untuk membiayai aparat keamanan serta memperkuat jaringan patronase politik di kalangan militer dan elite partai. Meskipun secara formal Sudan memiliki institusi demokrasi seperti parlemen dan pemilu, lembaga-lembaga tersebut hanya berfungsi sebagai kedok semu demokrasi. Pada kenyataannya, seluruh proses politik dikendalikan ketat oleh rezim melalui manipulasi hukum, kooptasi, dan intimidasi, sehingga ruang partisipasi politik yang sesungguhnya sangat terbatas (Nordberg, 2023).

### **Kudeta 2021 dan Kegagalan Konsolidasi Demokrasi**

Meskipun kesepakatan transisi pada 2019 membuka jalan menuju pemerintahan sipil, kenyataannya proses demokratisasi di Sudan segera menghadapi berbagai rintangan serius. Ketegangan antara aktor-aktor militer dan sipil semakin nyata sepanjang periode transisi. Militer, khususnya pimpinan Dewan Kedaualatan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menunjukkan keengganan untuk benar-benar berbagi kekuasaan dengan komponen sipil. Kesenjangan kepentingan tersebut mencapai puncaknya pada 25 Oktober 2021, ketika al-Burhan melancarkan kudeta militer dan membubarkan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Kudeta tersebut menandai kemunduran besar dari proses demokratisasi, serta menggantikan harapan dengan ketidakpastian dan ketakutan akan kembalinya otoritarianisme (Gabardo et al., 2021).

Gelombang protes rakyat kembali merebak pasca-kudeta. Rakyat Sudan turun ke jalan menuntut dikembalikannya pemerintahan sipil, dengan slogan yang sama seperti pada 2019, yaitu kebebasan, perdamaian, dan keadilan. Namun, respons militer sangat represif. Pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk membubarkan demonstrasi, yang kemudian menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan orang dalam beberapa bulan setelah terjadinya kudeta (Cormac, 2022). Upaya rekonsiliasi sempat dilakukan dengan mengembalikan Hamdok ke posisinya pada November 2021 melalui kesepakatan politik baru. Namun, kesepakatan tersebut ditolak luas oleh masyarakat sipil yang menganggapnya sebagai kompromi dengan pelaku kudeta, hingga akhirnya Hamdok mengundurkan diri pada Januari 2022, serta menyebut kegagalannya dalam membentuk konsensus nasional

(Lachapelle & Hellmeier, 2024).

Di tengah situasi politik yang semakin tidak stabil, konflik internal dalam institusi militer turut memperparah situasi. Ketegangan antara Angkatan Bersenjata Sudan (*Sudan Armed Forces/SAF*) yang dipimpin al-Burhan dan kelompok paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF) yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo mulai terlihat sejak pertengahan 2022. Akar dari ketegangan ini dipicu oleh upaya reformasi sektor keamanan, khususnya isu integrasi *Rapid Support Forces* kedalam *Sudan Armed Forces*. Namun, rendahnya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak dan perebutan kendali atas sumber daya serta wilayah strategis, membuat konflik terbuka tidak terhindarkan. Pada April 2023, pertempuran antara *Sudan Armed Force* dan *Rapid Support Force* pecah di ibu kota Khartoum serta berbagai wilayah lain, yang segera berkembang menjadi konflik bersenjata berskala besar (Afriyie, 2024).

Kekerasan tersebut memusnahkan sisa-sisa proses transisi dan menghancurkan struktur pemerintahan yang rapuh. Lembaga-lembaga sipil tidak lagi berfungsi, dan jutaan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Selain korban jiwa yang terus meningkat, ekonomi Sudan runtuh, layanan publik terhenti, dan wilayah-wilayah tertentu jatuh dalam kekacauan serta kekosongan kekuasaan. Persaingan elit militer tersebut memperjelas bahwa hambatan utama bagi demokratisasi Sudan bukan hanya ketidaksiapan institusi sipil, melainkan dominasi kekuatan bersenjata yang memandang negara sebagai medan perebutan kekuasaan pribadi, bukan sebagai alat pelayanan publik. Dengan latar belakang tersebut, demokrasi Sudan bukan hanya tertunda, melainkan berada di ambang kehancuran total, serta terkubur dalam ambisi pribadi para komandan militer yang pernah mengaku sebagai pelindung revolusi.

### **Etnisitas, Agama, dan Peran Masyarakat Sipil Dalam Perjuangan Demokratisasi**

Demokratisasi di Sudan tidak hanya dihambat oleh dominasi militer serta konflik kekuasaan, tetapi juga oleh kompleksitas sosial dan budaya yang dalam, khususnya terkait dengan isu etnisitas dan agama. Sudan merupakan negara dengan keragaman etnis yang tinggi, serta dihuni oleh lebih dari 500 kelompok etnolinguistik. Ketimpangan historis antara pusat kekuasaan di Khartoum yang didominasi oleh elite Arab-Muslim dan wilayah pinggiran seperti Darfur, Kordofan Selatan, serta Nil Biru yang mayoritas dihuni oleh etnis non-Arab menjadi akar dari berbagai konflik internal. Pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Omar al-Bashir, mengeksploitasi identitas agama dan etnis untuk mempertahankan kekuasaan, seperti dengan melancarkan kampanye Islamisasi dan Arabisasi secara agresif, serta menyasar kelompok minoritas dalam kampanye militer yang brutal (Bahozde, 2025). Pecahnya konflik di Darfur pada tahun 2003 merupakan salah satu bukti nyata bagaimana identitas etnis telah digunakan sebagai alat kekerasan politik yang sistematis. Pasukan pemerintah dan milisi yang didukung al-Bashir, seperti *Janjaweed* (yang kemudian bertransformasi menjadi *Rapid Support Forces/RSF*), dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap kelompok etnis non-Arab di wilayah. Meskipun Revolusi 2019 sempat membawa harapan untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, struktur negara yang masih sangat terpusat dan pola eksklusif terhadap daerah-daerah pinggiran belum mengalami perubahan secara signifikan. Berbagai kelompok etnis masih tetap merasa terpinggirkan dari proses transisi politik, sehingga memperlemah legitimasi pemerintah transisi dan memperumit konsolidasi demokrasi (Omoigberale, 2025).

Agama juga memiliki peran ambigu dalam politik Sudan. Rezim Bashir mengukuhkan identitas Islam Sunni sebagai dasar ideologi negara dan menerapkan hukum syariah secara nasional, meskipun masyarakat Sudan tidak homogen secara keagamaan maupun dalam praktik keislamannya. Setelah Revolusi 2019, pemerintah transisi mengambil langkah penting dengan mencabut status Islam sebagai agama resmi negara, sebagai suatu bentuk upaya untuk menuju negara yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, perubahan kebijakan tersebut juga menimbulkan penolakan dari kelompok konservatif Islam, yang kemudian menjadi salah satu sumber ketegangan politik yang dieksploitasi oleh militer untuk mendapatkan dukungan dari kalangan Islamis (Ayoob & Lussier, 2020).

Dalam konteks transisi politik yang penuh ketidakpastian di Sudan, masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai kekuatan yang menjaga aspirasi agar demokrasi tetap hidup di tengah tekanan aktor-aktor militer dan elite politik. Merujuk pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh David Held, demokrasi tidak hanya semata-mata bertumpu pada proses pemilu saja, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat sistem politik demokratis melalui keterlibatan aktif di publik. Partisipasi ini menjadi pondasi dari sistem demokratis yang sehat, karena memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Demokrasi yang ideal harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara sungguh-sungguh mencerminkan aspirasi masyarakat (Held, 2006).

Dalam upaya mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, proses demokratisasi menjadi salah satu elemen kunci sebagai mekanisme untuk memperluas partisipasi politik, memperkuat kontrol serta membangun struktur pemerintahan yang transparan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Di Sudan, demokratisasi didorong oleh peran aktif masyarakat sipil, terutama melalui gerakan seperti *Sudanese Professionals Association* (SPA), *Force of Freedom and Change* (FFC), komite lingkungan (*resistance committees*), organisasi perempuan, serta banyaknya organisasi, serta jaringan aktivis muda turut membentuk pondasi penting dan menjadi kekuatan utama yang mengorganisir dan memobilisasi massa dan penyebaran ide-ide dalam proses demokrasi. Kelompok masyarakat ini membentuk pondasi penting bagi penyebaran nilai demokrasi. Namun, mereka juga tak luput dari tekanan berat militer dan kekurangan dukungan institusional untuk berkembang menjadi kekuatan politik formal (Laqzmitha & Yumitro, 2023).

Setelah runtuhnya rezim Omar al-Bashir, banyak pengamat yang lebih berfokus pada aktor politik formal seperti militer dan partai-partai oposisi. Namun, kekuatan utama yang mendorong perubahan sebenarnya berasal dari masyarakat sipil, yang menjadi elemen kunci dari gerakan protes dan tuntutan reformasi politik di Sudan. *Sudanese Professionals Associations* atau SPA, merupakan sebuah asosiasi lintas profesi yang terdiri dari berbagai dokter, pengacara, insinyur, guru, dan berbagai profesional lainnya, yang terbentuk pada tahun 2012 sebagai gerakan yang memperjuangkan reformasi ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan para profesi. Namun seiring berjalannya waktu, SPA bertransformasi menjadi aktor utama dalam menentang kekuasaan rezim otoriter Omar al-Bashir, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2018 yang memicu gelombang ketidakpuasan dan kemarahan publik (Agati, 2021).

Keberhasilan *Sudanese Professionals Association* (SPA) tidak hanya terletak pada

kekuatan organisasinya, tetapi juga pada kemampuan dalam memobilisasi opini publik dalam membangun jaringan komunikasi yang strategis di tengah pembatasan ruang sipil oleh rezim otoriter. Menurut Wessels (2023), kekuatan utama SPA terletak pada cara mereka memimpin secara kolektif dan membangun jaringan yang setara. Pendekatan ini memungkinkan untuk menjangkau berbagai kelompok sosial dari wilayah yang luas, serta memudahkan untuk mengkoordinasikan aksi dan menyatukan gerakan di tengah kondisi politik yang represif. Pada puncak gerakannya, SPA berhasil mengkoordinasi lebih dari 60 aksi unjuk rasa di 12 kota besar di Sudan, dan jumlah peserta demonstrasi yang ikut diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta orang. Aksi-aksi unjuk rasa tersebut bukan hanya sekedar protes terhadap krisis ekonomi dan tekanan politik, tetapi juga mencerminkan keinginan rakyat untuk menuntut perubahan besar melalui sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan adil (Wessels, 2023).

Dalam perspektif Ernest Gellner (1994), konsep *civil society* atau masyarakat sipil idealnya berfungsi sebagai entitas mandiri, yang berada di antara negara dan individu, yang mampu menciptakan ruang sosial dimana individu bebas untuk berinteraksi dan mengorganisasi diri independen tanpa adanya campur tangan langsung dari negara maupun elite kekuasaan. Konsep ini menemukan bentuk nyatanya dalam pergerakan *Sudanese Professionals Association* (SPA), yang membuktikan diri sebagai ruang publik otonom yang efektif dan berhasil membangun jaringan organisasi yang mampu membantu menyuarakan kepentingan rakyat. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam proses konsolidasi demokrasi. Setelah kudeta militer tahun 2021, tekanan terhadap masyarakat sipil, termasuk SPA, meningkat drastis dan menyebabkan perpecahan dan kesulitan dalam mempertahankan upaya yang berujung pada kegagalan demokrasi (Makonye, 2023).

Kondisi demokrasi di Sudan hingga saat ini masih berada dalam situasi yang sangat kritis dan tidak stabil, terlebih lagi sejak pecahnya perang saudara pada April 2023 yang melibatkan *Sudan Armed Force* (SAF) dan *Rapid Support Force* (RSF). Konflik bersenjata ini tidak hanya mengakhiri sisa-sisa harapan terhadap transisi demokrasi yang masih tersisa, tetapi juga menciptakan salah satu krisis kemanusiaan yang terbesar di dunia saat ini. Perang ini telah menewaskan setidaknya 24.000 korban jiwa, sementara sekitar 13 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi, dengan lebih dari 4 juta orang lainnya terpaksa melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Chad. Hal ini kemudian memperburuk kondisi demokrasi, karena saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat internasional lebih tertuju pada penanganan konflik dan krisis kemanusiaan, sehingga upaya konsolidasi demokrasi harus terpinggirkan (Magdy, 2025).

Kegagalan proses demokratisasi di Sudan mencerminkan kompleksitas dinamika transisi politik di negara-negara berkembang, sebagaimana telah dijelaskan oleh Huntington (1991) dalam teorinya tentang gelombang demokratisasi. Huntington menjelaskan bahwa tidak semua negara yang mengalami perubahan rezim atau transisi politik secara otomatis dapat berhasil mencapai demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus kegagalan seringkali disebabkan oleh ketegangan internal atau lemahnya institusi politik serta ketidakmampuan pemerintah dalam membangun sistem yang kuat. Dominannya struktur kekuasaan militer serta lemahnya institusi lembaga-lembaga sipil menjadi faktor

utama dalam kegagalan transisi politik di Sudan. Hal ini menjadi contoh nyata dari Huntington, dimana jika sebuah negara tidak memiliki lembaga yang kuat dan pemimpin yang benar-benar ingin melakukan perubahan, maka proses transisi politik akan menimbulkan ketidakstabilan, dan pada akhirnya mengembalikan negara tersebut ke dalam lingkaran krisis dan konflik yang terus berulang (Huntington, 1993).

## KESIMPULAN

Proses demokratisasi di Sudan sejak runtuhnya rezim Omar al-Bashir telah menghadapi jalan terjal yang dipenuhi pengkhianatan politik, konflik bersenjata, dan ketegangan sosial yang mendalam. Harapan akan transisi damai menuju pemerintahan sipil yang inklusif berulang kali digagalkan oleh dominasi militer, persaingan elit bersenjata, dan lemahnya institusi negara. Di tengah perpecahan etnis serta warisan politik eksklusif berbasis agama, masyarakat sipil tetap menjadi aktor paling konsisten dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Namun, kekuatan mereka terhambat oleh represi, keterbatasan sumber daya, dan absennya perlindungan struktural. Di tengah kondisi negara yang nyaris runtuh akibat perang saudara berkepanjangan, prospek demokrasi Sudan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat sipil untuk mempertahankan ruang-ruang perjuangan agar demokrasi tetap hidup dan membangun kembali dari bawah. Masa depan demokrasi Sudan juga ditentukan oleh sejauh mana komunitas internasional dapat memberikan dukungan nyata, tidak hanya dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga lewat tekanan politik agar para pemimpin militer dan politik bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Dukungan ini juga perlu mendorong terciptanya solusi damai yang adil dan menyeluruh. Tanpa semua itu Sudan berisiko terus terperangkap dalam kekerasan dan kegagalan dalam membangun sistem demokrasi yang stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agati, M. E. (2021, November 9). *Sudanese Professionals Association: Structure, Evolution, Roles and Coalitions - Challenges and Future Prospects*. Arab Reform Initiative. <https://www.arab-reform.net/publication/sudanese-professionals-association-structure-evolution-roles-and-coalitions-challenges-and-future-prospects/>
- [2] Alweqyan, D. (2024, Mei). Coup in International Law: Between Theory and Reality. *Journal of East Asia and International Law*, 17(1), 61-86.
- [3] Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). (2020). *Danse Macabre: Revolution and Counter-Revolution in Post-Oil Sudan*.
- [4] Aswani, R. S., & Sajith, S. (2024). Geopolitical Asymmetries and Politics for Resources. In *Cooperative Sustainable Development: A Geostrategic Band-Aid to Energy Insecurity* (pp. 49-76). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-4461-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-97-4461-9_2)
- [5] Ayoob, M., & Lussier, D. N. (2020). *The Many Faces of Political Islam, Second Edition: Religion and Politics in Muslim Societies*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.11448711>
- [6] Back, I. (2020). *From Sudan to South Sudan: IGAD and the Role of Regional Mediation in Africa* (African Social Studies ed., Vol. 41). Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004425323>

- [7] Çınar, H. Y., & Özer, A. (2023, December 26). Internal and External Factors behind the Instability in Sudan. *PERCEPTIONS: Journal of International Affairs*, 28(2), 173-193. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4410435>
- [8] Collins, R. O. (2008). *A History of Modern Sudan*. Cambridge University Press.
- [9] Cormac, R. (2022). *How to Stage a Coup: And Ten Other Lessons from the World of Secret Statecraft*. Atlantic Books.
- [10] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452226095>
- [11] de Waal, A. (2015). *The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power*. Polity Press.
- [12] Elbadawi, I., & Alhelo, A. (2023). The Sudan Syndrome: State-Society Contests and the Future of Democracy after the December 2018 Revolution. *Economic Research Forum (ERF)*.
- [13] Firmian, F. M., & Mirghani, O. (2022). Can Sudan's Democratic Transition Be Salvaged? *Middle East Policy*, 29(2), 134-149. <https://doi.org/10.1111/mepo.12577>
- [14] Flint, J., & Waal, A. d. (2008). *Darfur : A New History of a Long War*. Bloomsbury Academic. Zed Books.
- [15] Gabardo, E., Brepohl, M., & Gonçalves, M. (2021). Authoritarian Setback in the Current Crisis of Brazilian Democracy. *Tempo & Argumento*, 13(34), 1-48. <https://doi.org/10.5965/2175180313342021e0304>
- [16] Gellner, E. (1994). *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*. London & Toronto: Hamish Hamilton. Penguin Books.
- [17] Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (1st ed.). UMM Press.
- [18] Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed. ed.). Stanford University Press.
- [19] Heydemann, S. (2007, October 15). *Upgrading Authoritarianism in the Arab World*. Brookings Institution. Retrieved May 10, 2025, from <https://www.brookings.edu/articles/upgrading-authoritarianism-in-the-arab-world/>
- [19] Human Rights Watch. (2005, December 8). *Entrenching Impunity: Government Responsibility for International Crimes in Darfur*. Retrieved May 10, 2025, from <https://www.hrw.org/report/2005/12/08/entrenching-impunity/governmentresponsibility-international-crimes-darfur>
- [20] Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- [21] IMF. (2014, December 30). *Sudan: 2014 Article Iv Consultation and Second Review Under Staff-Monitored Program—Staff Report; Press Releases; And Statemen*. International Monetary Fund (IMF). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14364.pdf>
- [22] Johnson, D. H. (2016). *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Old Wars & New Wars* ((Expanded 3rd Edition ed., Vol. NED-New edition, pp. 21–38)). James Currey.
- [23] Kostelyanets, S. (2022). Sudan's December Revolution and the Demise of the Al Bashir Regime. In L. Issaev & A. Korotayev (Eds.), *New Wave of Revolutions in the MENA Region: A Comparative Perspective* (pp. 33-56). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-15135-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-15135-4_2)
- [24] Lachapelle, J., & Hellmeier, S. (2022, December 15). Pathways to democracy after

- authoritarian breakdown: Comparative case selection and lessons from the past. *International Political Science Review*, 45(1).  
<https://doi.org/10.1177/01925121221138408>
- [25] Laqzmitha, F. A., & Yumitro, G. (2023). Demokratisasi Negara Sudan Pasca Berakhirnya Pemerintahan Islam. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 15 (2), 212-228.
- [26] Magdy, S. (2025, May 10). *At least 20 people killed in Sudan after a suspected drone strike hits a prison*. AP News. Retrieved May 12, 2025, from <https://apnews.com/article/sudan-military-rsf-war-e55bca6562f4d9d29630480bc47e6a84>
- [27] Makonye, F. (2023, December). Political Reflections on the Sudanese Civil War 2023: A Qualitative Study. *African Journal of Peace and Conflict Studies*, 12(3), 71-82.  
<http://dx.doi.org/10.31920/2634-3665/2023/v12n3a4>
- [28] McDonough, A., & Rodríguez, D. C. (2020). How Donors Support Civil Society as Government Accountability Advocates: A Review of Strategies and Implications for Transition of Donor Funding in Global Health. *Globalization and Health*, 16, 1-18.  
<https://doi.org/10.1186/s12992-020-00628-6>
- [29] Mwaniki, A. (2019, July 18). *Ethnic Groups Of Sudan*. WorldAtlas.  
<https://www.worldatlas.com/articles/the-ethnic-groups-in-sudan.html>
- [30] Nordberg, T. (2023, May 2). *Sudan: How Omar al-Bashir's legacy is playing out today*. Global Bar Magazine. Retrieved May 10, 2025, from <https://globalbar.se/2023/05/sudan-how-omar-al-bashirs-legacy-is-playing-out-today/>
- [31] Omoigberale, O. (2025, April 24). Navigating the Fault Lines: The Paradoxes of Majoritarian Democracy and Minority Rights in Nigeria's Multi-Ethnic Polity. *Peace Review*, 1-22. <https://doi.org/10.1080/10402659.2025.2493662>
- [32] Riedl, R. B., Slater, D., Wong, J., & Ziblatt, D. (2020). Authoritarian-Led Democratization. *Annual Review of Political Science*, 23(1), 315-332.  
<https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052318-025732>
- [33] Rone, J. (2003). *Sudan, Oil, and Human Rights*. Human Rights Watch.
- [34] Rothbart, D., Korostelina, K., & Gjelloshi, B. (2022, February 10). Living through war: An oral history of civilians in Sudan. *WILEY*, 406. 10.1002/crq.21382
- [35] SAPA. (2024, September 20). *Sudan Civil War: History & Implications [6 Root Causes]*. Sudanese American Physicians Association. Retrieved May 9, 2025, from <https://sapa-usa.org/sudan-civil-war/>
- [36] UNHCR. (2020). *Global Appeal 2020-2021: Sudan Country Report*. United Nations High Commissioner for Refugees.
- [37] UNICEF. (2020, December). *Sudan Humanitarian Situation Report: January-December 2020*. <https://www.unicef.org/media/94421/file/UNICEF-Sudan-Humanitarian-Situation-Report-End-of-Year-2020.pdf>
- [38] Wahiduddin. (2020). *Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir*. (1st ed., Vol. 17). Nady Al-Adab. <https://doi.org/10.20956/jna.v17i1.10086>
- [39] Wessels, J. (2023). The Role of the Sudanese Professionals Association in the Revolution of 2019 Towards Development and Social Change. In *Strategic Communication Management for Development and Social Change* (pp. 143-159).